CO-MANAGEMENT INTER STAKEHOLDER AS A PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODEL IN DEVELOPMENT PROGRAM FOR RURAL INFRASTRUCTURE

Taufik Kurniawan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Bidang Ekonomi dan Keuangan Email : tk.taufikkurniawan@gmail.com

ABSTRACT

Rural development needs to be tune in with the community, because limited capacity of the government. Rural development is possible only with community participation. The concept of partnership-based participation is known as co-management. The purpose of this research is to describe and analyze the application of co-management concept among stakeholders in rural infrastructure development program. In co-management there are four elements are academia, business, society and government. The method used in this research is descriptive method analysis of primary and secondary data. The results show that co-management can be applied to PPIP activities. Other findings from the study, indicating the role of community elements is more dominant than other elements.

Keywords: Co-management, stakeholder

CO- MANAGEMENT ANTAR STAKEHOLDER SEBAGAI MODEL PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

ABSTRAK

Pembangunan perdesaan memerlukan kebersamaan dengan masyarakat, karena kemampuan pemerintah yang semakin terbatas. Pembangunan perdesaan hanya mungkin bisa dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi yang berbasiskan kemitraan dikenal dengan *co-management*. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan konsep *co management* antar stakeholder dalam program pembangunan infrastruktur perdesaaan. Dalam *co-management* terdapat empat unsur yaitu akademisi, bisnis, masyarakat dan pemerintah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *co-management* dapat diterapkan pada kegiatan PPIP. Temuan lainnya dari penelitian ,menujukkan peran unsur masyarakat lebih dominan dibanding unsur lain.

Kata kunci: Co-management, stakeholder

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan perdesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Hal ini karena kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan perdesaan makin terbatas. Hanya melalui partisipasi aktif masyarakat yang memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa di Indonesia. Djoeroemana et al. (2007) dan Rosegrant et al. (2007)mengungkapkan pengembangan perdesaan hanya mungkin dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Kendati demikian, pendekatan partisipatif dari masyarakat saja masih belum memadai untuk mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka permbangunan perdesaan. Perlu ada pihak lain yang turut untuk bekerjasama terutama kegiatan pendampingan, inkubasi bisnis, dan pengelolaan Public-Private selanjutnya. **Partnership** merupakan salah satu model kemitraan sebagai alternatif untuk menguatkan model partisipasi masyarakat. Pengelolaan kemitraan secara terpadu yang sering juga disebut dengan Cooperative Management (disingkat management) adalah suatu model pengelolaan sumberdaya baik fisik maupun non fisik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait. untuk Tujuannya selain meningkatkan efektivitas pengelolaan, juga sebagai koreksi, mengingat kegagalan praktik pengelolaan baik yang bertumpu pada kebijakan pemerintah maupun yang bertumpu pada masyarakat, yang masih memiliki kelemahan mendasar. Pada pengelolaan yang bertumpu pada pemerintah, kelemahannya antara lain adalah kurangnya aparat yang mengawasi pelaksanaan kebijakan yang digariskan, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi. Apalagi jika daerah tersebut memiliki wilayah yang luas. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan juga sangat besar terutama untuk mengumpulkan data yang akurat tentang kondisi infrastruktur yang ada. Adapun kebijakan yang

bertumpu pada masyarakat, kelemahannya antara lain adalah mudah berubahnya sistem pengelolaan, baik karena perubahan jumlah penduduk, maupun karena permintaan pasar yang tinggi terhadap suatu jenis infrastruktur tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi secara lebih besar sehingga aspek keberlanjutan menjadi terabaikan. Dengan demikian pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa pihak secara terkoordinasi dan terintegrasi akan lebih menguntungkan karena sifat kegiatan infrastruktur yang komplementer dan saling melengkapi.

Pengelolaan pembangunan kegiatan alternatif infrastruktur dalam pengelolaan berupa pengelolaan secara kooperatif melalui kemitraan stakeholders (Public-Private-**Partnership** atau dikenal dengan Co-Management Approach). Pendekatan comanagement sebagaimana diungkapkan beberapa peneliti, di antaranya diterapkan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan seperti sumberdaya perikanan, sumberdaya mangrove, dan pengelolaan sungai. Namun sejauh ini belum ditemukan penelitian serupa mengaplikasikan pendekatan co-management sebagai model pengelolaan pembangunan infastruktur perdesaan. Penelitian ini diharapkan mampu merumuskan rekayasa model pengelolaan pembangunan infrastuktur melalui alokasi dana PPIP dengan pendekatan kemitraan Indonesia, dengan studi Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pembangunan infrastruktur desa berbasikan kemitraan yang selaras dengan program pembangunan perdesaan secara terstruktur, sistematis, keberlanjutan, dan konsisten.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Co-Management

Murdoch (2000) mengemukakan konsep pembangunan perdesaaan yang menekankan peran network (jaringan) antar sektor mulai dari arus hulu hingga hilir. Pentingnya keterkaitan ini dalam jaringan ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan desa dapat tercapai dengan baik apabila desa tersebut dikaitkan dengan pengembangan kota dalam wilayah tersebut Dengan demikian akan tercipta pola interaksi yang dinamis, bergerak dari waktu ke waktu sesuai tingkatan kemajuan suatu masyarakat.

Lebih (Murdoch, 2000) lanjut mengemukakan bentuk keterkaitan yang ada antara lain (1) keterkaitan pola pasar, aliran barang mentah dan antara, aliran modal dan pendapatan, penyediaan input; (2) keterkaitan teknologi; (3) keterkaitan supply energi, bantuan kredit dan finansial. Jaringan yang akan terbangun dapat pula diperkuat dengan lembaga intermediary dapat memberikan pengembangan bisnis meliputi (1) layanan informasi; (2) layanan konsultasi; (3) layanan pelatihan; (4) pendampingan; (5) kontak bisnis; (6) fasilitasi dalam memperluas akses ke pasar; (7) fasilitasi dalam pengembangan organisasi dan managemen; (8) fasilitasi memperoleh permodalan; (9) fasilitasi dalam pengembangan teknologi; (10)penyusunan proposal pengembangan bisnis.

Sejalan dengan konsep co-management, dikenal juga konsep kolaborasi. Pada dasarnya situasi yang mengharuskan pergeseran konsep kerja secara independen ke konsep kemitraan atau co management. Hal ini dikemukakan oleh Raharja (2009) bahwa hubungan antar organisasi kini dicirikan oleh masa kesalingtergantungan (interdependensi) satu sama lain karena situasi lingkungan yang dinamis dan terus berubah. Perubahan atau pergeseran independen dari sifat ke interdependen telah melahirkan berbagai pemikiran yang mengarahkan kepada model pengelolaan bisnis berdasarkan kemitraan, tidak lagi berdasarkan kompetisi (persaingan).

Taket and White, 2000 (dalam Raharja, 2009) mengemukakan pergeseran dari sifat independen ke kolaborasi mengakibatkan implikasi penting pada; (1) Kebebasan dan otonomi, berkaitan unit yang datang dan masuk dalam kolaborasi adalah independen dan kemudian memilih kerjasama; (2) Unit otonom dalam organisasi yang bekerja bersama menuju tujuan kolektif; (3) Interdependensi antar mitra, yang sebelumnya swakeloa (mandiri); (4) Kombinasi kekuatan yang saling menguatkan satu sama lain untuk menutupi kelemahan setiap unit yang berkolaborasi. Penerapan konsep kolaborasi memperlihatkan bahwa relasi antar organisasi dapat menciptakan situasi yang komplementer (saling melengkapi) yang pararel dengan sifat kolaborasi dimana relasi antar organisasi saling tergantung

Kembali ke konsep berbasis *co-management* yang pada dasarnya merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara adaptif, inovatif dan integratif dalam satu kesatuan. Keterpaduan dalam co-management akan bisa berjalan baik apabila terdapat keterpaduan sudut pandang. Untuk pandangan tentang bagaimana pengelolaan sumberdaya itu harus dilakukan, merupakan unsur penting bagi terwujudnya management.

Implementasi pendekatan Co-Management yang berkenaan langsung adalah adanya hubungan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dunia bisnis stakeholder lain dan lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya tertentu. Co-Management atau pendekatan kemitraan, merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pengelolaan oleh semua anggota kelompok masyarakat dan kelompok yang mempunyai keterkaitan dengan sumberdaya tersebut. Elemen pokok yang harus diperhatikan adalah: (1) Pembagian tanggung jawab dan

wewenang dalam pengelolaan; (2) Tujuan sosial, budaya, dan ekonomi; (3) Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan.

Pemerintah memandang pendekatan kemitraan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang terjadi dan membagi tanggungjawab kepada masyarakat, *stakeholder* dan swasta, dengan begitu mengurangi beban pemerintah dari biaya dan tanggungjawab untuk pengelolaan. Masyarakat pemakai sumberdaya diberi kepercayaan untuk mengatur sumberdaya agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Pomeroy and Williams (2004) menyatakan pihak swasta, stakeholder dan organisasi internasional mendasari terbentuknya suatu untuk mengendalikan kekuatan sistem pendekatan kemitraan

Konsep Stakeholder

Stakeholder dapat diartkan sebagai orang atau oganisasi yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program-program pembangunan serta orang-orang atau organisasi yang terkena dampak kegiatan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut, ada lima kategori stakeholder

- Primary stakeholder yaitu orang dan organisme hidup lainnya yang sangat tergantung kepada sumberdaya setempat untuk kelangsungan hidupnya
- Secondary stakeholder, yaitu orang dan organisasi yang memiliki hak atau kepentingan terhadap organisasi sumberdaya atau wilayah tertentu, termasuk dalam hal ini pemerintah dan lembaga bisnis
- Micro level stakeholder, kelompok lokal berskala kecil yang merupakan penggunaseketika dan pengelola sejati sumberdaya dalam kegiatan sehari-harinya
- Macrolevel Stakeholder: perencana wilayah dan nasional, instansi pemerintah di tingkat pusat serta komunitas global dan konsumen global
- Stakeholder analysis, yaitu suatu proses dalam menjabarkan sifat, ciri dan atribut yang dimiliki oleh stakeholder klasifikasi lebih jauh tentang stakeholder dan perannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1 Analisis dan Manajemen Stakeholder

		Stakeholder Eksternal
Analisis Stakeholder	Identifikasi Stakeholder	Stakeholder Interna
	Klasifikasi Stakeholder	Tipe Pengaruh Tipe Kepentingan Ketergantungan Potensi Kerjasama
		Potensi Ancaman Tingkat Kepentingan
Stakeholder	Prioritasisasi	Bagi Organisasi Transaksi
		Pertemuan
	Penilaian Kebutuhan dan Konstribusi Ide	Survei
		Penelitian Keterlinbatan Langsung
	Integrasi Pengetahuan dalam Proses	Misi dan Tujuan
	Manajemen Stratejik	Strategi-Strategi
		Implementasi Rencana Media Cetak
	Komunikasi Stakeholder	Ungkap Pendapat
Pengelolaan	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rapat
Stakeholder		Transaksi
		Survei

Negosiasi dan Kontrak dengan	Kontrak
Stakeholder	Join Venture
	Kepercayaan dan keadilan
Pengelolaan Hubungan dengan	Saling Memuaskan Kebutuhan
Stakeholder	
	Finansial
Motivasi Stakeholder Untuk	Motivasi Hukum dan Politik
Kemanfaatan Organisasi	Motivasi Kultural
	Persuasi

Sumber: Diadaptasi dari Harrison and John (1994)

Tabel 2 Tipe Peran-Peran Stakeholder

SIFAT KEPEN-	KEPEMILIKAN	Pimpinan dan Karyawan Pemilik saham (ESOP Direksi Pemilik Saham Pemilik Saham Pada Umumnya Perusahaan perorangan	Perusahaan Lain Sebagai Pemilik Saham	Passing
TINGAN	KETERGANTUNGAN EKONOMI	Direksi dan Pimpinan Pada Perusahaan maupun Lembaga Nirlaba Mitra Kerjasama Pemberi Kredit Kantor Pajak/Dinas Pendapatan	Karyawan Pelanggan Pemasok Pemberi Kredit Pesaing	Pesaing Pemerintah Asing Masyarakat Lokal
SOSIAL		Badan Pengatur/ Pengelola/ Pengendali Wali Amanat dan Pimpinan Organisasi Nirlaba	Komunitas Keungan (Pialang, Manajer Investasi, Analis Keuangan)	Kelompok Aktivis (Lingkungan dll) Pemimpin Pemerintahaan Media
		FORMAL	EKONOMI	POLITIK

(Kontrak atau Peraturan)

Istilah stakeholders telah dipakai oleh banyak pihak dalam dengan berbagai bidang ilmu. Bahkan masyarakan awampun sudah dengan istilah stakeholder. sangat akrab Berbagaia lembaga telah menggunakan secara luas istilah stakeholder. Singkat kata setiap kebijakan atau keputusan senantiasa selalu dikaitkan dengan stakeholer. Arti stakeholderpun sering diterjemahkan sebagai para pemangku kepentingan, para atau pihakpihak yang terkait dengan suatu kebijakan atau keputusan. Dalam prosesnya stakeholder sering dipersempit dalam makna "key person", tokoh adat atau masyarakat, para pemimpin formal seperti Kepala Desa dan lain-lain

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan stakeholder stakeholder pengaruh diketegorikan kedalam beberapa kelompok yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci, yaitu (1) stakeholder utama, merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, Stakeholder dan proyek (2)

pendukung adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Stakeholders pendukung (sekunder) antara lain (a) lembaga (Aparat) pemerintah (b) Lembaga swadaya Masyarakat (LSM (c) Perguruan Tinggi yakni kelompok akademisi ini memiliki pengaruh pengambilan penting dalam keputusan pemerintah serta Pengusaha (Badan usaha) yang terkait sehingga mereka juga masuk dalam stakeholder pendukung kelompok (d) Pengusaha (Badan usaha) yang terkait. (3) stakeholder kunci, yaitu stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.

Sementara itu Budimanta dkk (2008) mengemukakan stakeholder adalah individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat jika memiliki karakteristik mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam perusahaan dapat terdiri dari:

- a. Pengusaha (Pemegang Saham) yang seharihari diwakili manajemen.
- b. Para pekerja dan serikat pekerja.
- c. Para pengusaha Pemasok.
- d. Masyarakat (konsumen).
- e. Perusahaan Pengguna.
- f. Masyarakat sekitar.
- g. Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam enelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner meliputi: keadaan sosial ekonomi; pemanfaatan program pembangunan infrastruktur desa; manfaat yang dirasakan; biaya kompensasi yang harus dikeluarkan; serta penilaian responden terhadap peran *stakeholders* selama ini dalam membantu usaha mereka. *Stakeholders* tersebut meliputi pemerintah, pengusaha swasta, lembaga keuangan, masyarakat, koperasi, dan akademisi.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari unsur-unsur yang mewakili yaitu; Akademisi (A), swasta/ pebisnis (B) Pemerintah (G) dan Komunitas (C). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan-bahan pustaka dan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Peran Stakeholder

Dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur desa, peran stakeholders sangat penting untuk diperhatikan. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan pemerintah program melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang infastruktur perdesaan dengan tujuan meningkatkan akses dan pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya spesifik dalam pembangunan infrakstruktur pedesaan.

Stakeholders dalam pengelolaan PPIP dengan pendekatan kemitraan terdiri dari unsur pemerintah terkait (Dinas PU, Konsultan PU, Fasilitator PU, Bappeda, dan Bapermasdes), Organisasi Masyarakat Desa (OMS) yang mengelola kegiatan Pembangunan Infrastruktur di perdesaan, pengusaha/pebisnis/swasta yang memanfaatkan dan berada di sekitar akses jalan desa sebagai perwakilan unsur KPP dan juga pihak akademisi yaitu dari beberapa ikatan ahli/asosiasi panel ahli yang sifatnya akademik. Adapun tugas dan kewenangan dari masingmasing stakeholders dapat dilihat lebih rinci, pada penjelasan berikut.

a. Peran Pemerintah

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa pihak berkompeten, yang menunjukkan bahwa pemerintah yang selama ini yang berkontribusi besar adalah pemerintah daerah kabupaten khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan fasilitator di masing-masing desa. Dinas Pekerjaan Umum khususnya bidang Cipta Karya yang memang memahami seluk-beluk infrastruktur tentunya merupakan pihak yang paling berwenang dan berperan paling besar. Peran kewenangan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten yaitu Dinas PU Kabupaten) antara lain:

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan program di tingkat kabupaten.
- Memberi arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program di wilayah kerjanya.
- Memantau pelaksanaan program di tingkat kabupaten.
- Mengadakan pertemuan dengan Tim Koordinasi Kabupaten, Satuan Kerja (Satker) Kabupaten, Aparat Kecamatan dan Aparat Desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- Mengkoordinasikan rencana dan kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
- Melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa, OMS, dan KPP.
- Menyusun Laporan dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi PPIP Kabupaten dan Tim Pelaksana Provinsi.

Selain itu terdapat unsur bagian dari pemerintah yaitu fasilitator desa. Fasilitator merupakan tenaga kontrak yang diseleksi oleh pemerintah sebagai tutor maupun pendamping kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan. Sebagian besar fasilitator menurut persepsi masyarakat banyak yang belum melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan benar dan perekrutannya kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Kepala desa, dalam hal pengelolaan PPIP adalah pemimpin pemerintah desa sebagai

penyelenggara urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam penyelenggaraan PPIP tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wilayah kerjanya.
- Menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan (sosialisasi dan pembentukan OMS, KPP dan Kader Desa) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya.
- Menjamin penerapan prinsip PPIP dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan.
- Memantau penerapan prinsip PPIP dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan.
- Memfasilitasi terbentuknya OMS, KPP dan Kader Desa yang dilakukan melalui forum musyawarah tingkat desa.
- Membantu kelancaran proses penyusunan RKM.
- Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan pengendalian pelaksanan kegiatan.
- Menjamin dan memfasilitasi transparasi pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan POSKO OMS yang digunakan sebagai sekretariat di desa.
- Turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS.
- Memfasilitasi KPP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun.
- Menerima infrastruktur terbangun dan pemerintah kabupaten dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.
- Mendukung pelaksanaan PPIP melalui sinkronisasi program dan *channeling* ke *stakeholders* lainnya.
- Membina OMS agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif selanjutnya.

• Menandatangani serta mentaati Pakta Integritas bersama wakil masyarakat.

b. Tugas dan Kewenangan Masyarakat (OMS)

OMS (Organisasi Masyarakat Desa) ditetapkan dalam musyawarah Desa di setiap desa sasaran program dan disahkan oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Masyarakat juga dapat memanfaatkan organisasi yang sudah ada dan memenuhi kriteria yang telah disepakati, dengan melalui Musyawarah Desa dan pengesahan oleh Kepala Desa. Apabila desa pernah melaksanakan program PPIP dan OMS-nya keanggotaan berkinerja baik, disarankan agar masyarakat menggunakan OMS yang sudah ada. Susunan OMS terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan anggota, dengan keanggotaan minimal terdiri 40% perempuan. dari Perangkat pemerintah desa tidak diperbolehkan duduk dalam kepengurusan OMS dan tim pendukung OMS lainnya. OMS dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung di musyawarah Apabila pemilihan tidak mencapai desa. konsensus maka dilakukan melalui mekanisme kesepakatan. Adapun tugas OMS antara lain:

- Mentaati Pakta Integritas yang disepakati bersama kepala desa dan wakil masyarakat;
- Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat desa (plaksanaan Survey Kampung Sendiri (SKS);
- Mendorong dan menfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, masyarakat Miskin, dan kelompok minoritas dalam setiap tahapan kegiatan;
- Menyusun UPD bagi Desa yang belum mempunyai RPJM Desa atau PJM Pronangkis sebagai embrio dari RPJM Desa serta menyusun Usulan RKM;
- Mengajukan Usulan RKM kepada Tim Pelaksana Kabupaten untuk diverifikasi;
- Menyusun perencanaan teknis dan RAB dan melaksanakan RKM;

- Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dengan dual account, terdiri dari Ketua dan Bendahara OMS);
- Menjamin dan memfasilitasi transparansi kegiatan;
- Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) PPIP dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir tahap musdes perencanaan;
- Melakukan pengajuan pencairan kepada satker/PPK dengan lampiran Laporan Pelaksanaan kegiatan, buku Kas OMS yang dilengkapi nota/bukti pengeluaran dan foto kopi buku rekening bank OMS;
- Menyusun Laporan Buku Kas OMS dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran;
- Menyusun Laporan kemajuan pelaksanaan sesuai dengan format pedoman;
- Menyelenggakan rembug-rembug warga untuk membahas kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan minimal seminggu sekali;
- Menyebarluaskan laporan kemajuan kegiatan melalui media komunikasi yang ada di tingkat desa, papan informasi dan media lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak minimal seminggu sekali;
- Menyusun laporan akhir / pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibahas dalam Musdes IV;
- Menyelenggarakan Musdes IV;
- Menyampaikan laporan akhir hasil Musdes IV kepada Satker Kabupaten;
- Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secara baik untuk kepentingan audit.

c. Tugas dan Kewenangan Pebisnis/ Swasta sebagai Perwakilan KPP

KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) adalah organisasi warga masyarakat yang dapat terdiri dari unsur perwakilan masyarakat desa yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat infrastruktur yang biasanya sebagai **kaum pebisnis/pihak swasta,**

dan perwakilan masyarakat setempat. KPP dibentuk dalam Musyawarah Desa atau dengan difasilitasi oleh Fasilitator Masyarakat, dan disahkan oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Pelaksana Kabupaten. Berdasarkan wawancara mendalam, di beberapa desa banyak KPP yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan anggaran dana desa dan lemahnya tingkat swadaya dari kelompok pengguna untuk mau berkontribusi. Pihak swasta tentunya yang menerima kebermanfaatan lebih besar dibandingkan masyarakat desa pada umumnya, karena kemudahan akses jalan desa yang dilaluinya meningkatkan omset usaha dan distribusi menjadi lebih biaya murah. Seharusnya KPP dapat berjalan maksimal dengan mengoptimalkan peran pihak swasta maupun pebisnis yang menggerakkan usahanya bertempat di desa terpilih. KPP mutlak dibutuhkan terutama untuk mengakomodir bentuk swadaya masyarakat yang lebih mandiri berkesinambungan mengelola pembangunan infrastruktur desa berkelanjutan. Adapun tugas dan kewenangan KPP antara lain

- Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan rencana Operasional dan Pemeliharaan yang mencakup mekanisme pelaksanaan operasional dan pemeliharaan

- serta pendanaannya yang ditetapkan dalam Musdes III.
- Menyusun rencana kerja dan mekanisme operasional dan pemeliharaan infrastruktur secara lebih detail.
- Mengumpulkan dan mengelola dana untuk Operasional dan Pemeliharaan (O&P) yang diperoleh dari iuran warga kas desa, bantuan APBD dan pihak-pihak lainnya.
 - Membuka dan memelihara rekening bank untuk Dana O&P (terpisah dari rekening OMS). Rekening ini ditandatangani oleh Ketua KPP dan Bendahara (rekening bersama).

Analisis Peran Stakeholders

Dari hasil penilaian perwakilan masyarakat di tiap desa terhadap peran *stakeholders* dalam rangka pengelolaan pembangunan infrastruktur desa dapat diketahui bahwa baik pemerintah dan masyarakat sekitar mempunyai peran yang cukup vital dan penting meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun dalam hal pengawasan. Peranan OMS sebagai unsur komunitas (C) melalui partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan PPIP sangat signifikan. Pemerintah dalam hal ini Dinas PU beserta fasilitator memberikan kontribusi peran serta yang relatif lebih baik dibandingkan dengan instansi lain.

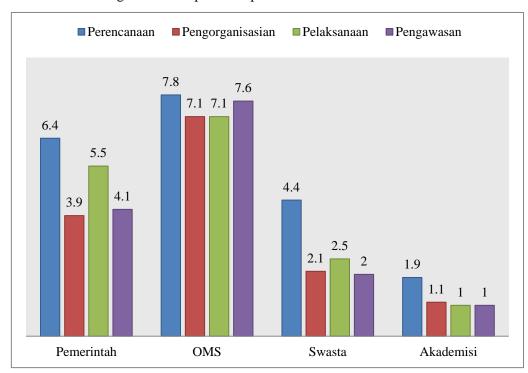
Tabel 1 Evaluasi Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (*existing*) menurut pihak yang berkompeten

No.	Kegiatan	Peran Stakeholders (n=27)			Rata-	T71 * C*1 *	
		Pemerintah	OMS	Pebisnis/swasta	Akademisi	Rata	Klasifikasi
1.	Perencanaan	6.4	7.8	4.4	1.9	5,1	Cukup
2.	Pengorganisasian	3.9	7.1	2.1	1.1	3.5	Buruk
3.	Pelaksanaan	5.5	7.1	2.5	1.0	4,0	Buruk
4.	Pengendalian	4.1	7.6	2.0	1.0	3,6	Buruk
Rata-	-rata	4.8	7.4	2.8	1.3		
Klasifikasi		Cukup	Cukup	Buruk	Buruk		

Sumber: Hasil Pengolahan data primer (2014)

Pada unsur kegiatan pelaksanaan, pemerintah khususnya dinas PU dengan OMS adalah pihak yang berperan besar, dibantu dengan Kepala Desa dan perangkatnya. Sedangkan peranan pihak swasta dan akademisi belum begitu tampak dan terlibat dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah masih kurang koordinasi pada tahap pengorganisasian dalam pengelolaan PPIP. Pada pebisnis hanya sebagai pengguna tanpa ada peran serta lebih dalam hal mengelola maupun memelihara keberlanjutan infrastruktur tersebut. Sedangkan peran pihak akademisi masih belum terlalu maksimal, dimana seharusnya dapat memberikan masukan dari sisi akademik dan membantu untuk menyuarakan aspirasi pihak yang dirugikan.



Gambar 1 Evaluasi Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Sumber: Hasil Pengolahan data primer (2014)

Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem kebijakan, kegiatan PPIP tidak ada saling tumpang tindih dalam menentukan kebijakan untuk pembangunan pedesaan karena adanya proses verifikasi usulan kegiatan di tingkat desa. Pada proses verifikasi usulan kegiatan di tingkat desa tersebut yang menghasilkan suatu kebijakan dari forum musyawarah masyarakat desa, Setiap desa diberi kesempatan untuk memberi usulan atau ide mengenai pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Jadi kebijakan mengenai kegiatan

PPIP jelas berbeda dengan kebijakan lain yang mengatur pembangunan perdesaan. PPIP merupakan hasil forum musyawarah di tingkat desa. Musyawarah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari OMS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Hasil penelitian ini dan beberapa studi yang menerapkan *co-management*, menunjukkan bahwa pendekatan *co-management* dapat diterapkan untuk pengaturan infrastruktur.
- Hasil pembahasan dalam konteks co management antar stakeholder dengan unsur-unsur A-B-C-G, menunjukkan peran OMS (Community = C) menunjukkan peran yang paling dominan dibandingkan dengan stakeholders lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimanta, Arif. Dkk. 2008. *Corporate Social Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: ICSD.
- Harrison, Jeffrey and Carron H. Saint John. 1993. Strategic Management of Organization and Stakeholders Theory
- Murdoch, Jonathan. 2000. *Networks a new paradigm of rural development?* Journal of Rural Studies 16 (2000) 407}419. PII: S0743-0167 (00) 00022-X
- Pomeroy, Robert S., William Meryl J. 2004. Fisheries Co-Management and Small-Scale Fisheries: A Policy Brief. Manila: ICLARM.
- Raharja, Sam'un Jaja 2009. *Kolaborasi Sebagai Strategi Bisnis Masa Depan* Jurnal
 Administrasi Bisnis, Vol.5, No.1: hal. 40–
 49, (ISSN:0216–1249) Center for Business
 Studies. FISIP Universitas Parahyangan
- Raharja, Sam'un Jaja, 2017 Analisis Strategi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum di Provinsi Jawa Barat. Seri ALG 001. Bandung. Penerbit ITB dan Departemen Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran

Taket, Ann and Leroy White, 2000, Partnership and Participation: Decision Making in the Multiagency Setting. Wiley. Chicester